

Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Kunjungan Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019

Ary Prasetyo¹, Andy Dwi Bawono²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

b200180163@student.ums.ac.id

Keywords:

capital expenditures,
economic growth,
population, tourist
visits,
local tax revenues

Abstract: Local tax revenue is a very influential factor for the government to always build and improve public facilities and services that are enjoyed by many people, therefore if the facilities and services used by the community are adequate or very qualified, the community will have more desire to always be on time. pay taxes that are used by the government to always add and improve public facilities that people often use. This study aims to analyze the effect of capital expenditure, economic growth, population, and tourist visits on local tax revenues. The sample selection method in this study was purposive sampling method and obtained 92 research samples. The results showed that capital expenditure, economic growth, and population had a significant effect on local tax revenues. Meanwhile, tourist visits have no effect on local tax revenues.

Kata Kunci:

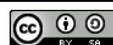
belanja modal,
pertumbuhan ekonomi,
jumlah penduduk,
kunjungan wisatawan,
penerimaan pajak
daerah

Abstrak: Penerimaan pajak daerah menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pemerintah untuk selalu membangun lalu memperbaiki fasilitas dan layanan publik yang dinikmati oleh banyak masyarakat, maka dari itu apabila fasilitas dan layanan yang digunakan oleh masyarakat memadai atau sangat mumpuni, masyarakat akan mempunyai keinginan lebih untuk selalu tepat waktu membayar pajak yang digunakan pemerintah untuk selalu menambah dan memperbaiki fasilitas publik yang masyarakat sering gunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dan diperoleh 92 sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Article History:

Received: 13-07-2022

Online : 04-08-2022



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



----- ◆ -----

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan suatu komponen penting dalam suatu negara. Tanpa pajak, negara tidak akan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk membangun infrastruktur, membiayai subsidi modal petani, memberikan subsidi bahan bakar bagi masyarakat kurang mampu, memelihara jalan, dan sebagainya. Penerimaan pajak daerah menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pemerintah untuk selalu membangun lalu memperbaiki fasilitas dan layanan publik yang dinikmati oleh banyak masyarakat, maka dari itu apabila fasilitas dan layanan yang digunakan

oleh masyarakat memadai atau sangat mumpuni, masyarakat akan mempunyai keinginan lebih untuk selalu tepat waktu membayar pajak yang digunakan pemerintah untuk selalu menambah dan memperbaiki fasilitas publik yang masyarakat sering gunakan.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan penerimaan pajak daerah ke-2 terbesar di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, penduduk di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai 49 juta jiwa yang membuat provinsi ini menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2020). Provinsi ini juga telah diresmikan dalam Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018, yang di mana seluruh infrastruktur strategis baru ini akan mendukung visi pengembangan khususnya wilayah Jawa Barat sebagai sentra kawasan industri nasional dan menciptakan kantong-kantong ekonomi baru bagi masyarakat, bisnis, dan UKM yang tergabung dalam rantai pasok dari industri yang akan beroperasi di kawasan baru itu (Masitoh, 2019) menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2018).

Penerimaan pajak daerah suatu wilayah ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kunjungan wisatawan. Belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pertumbuhan ekonomi regional juga menjadi andil dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik ditingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave & Musgrave (1989) besar kecilnya pendapatan pajak sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan faktor penting terhadap penerimaan pajak daerah. Salah satu faktor yang dapat menunjang penerimaan pendapatan pajak daerah adalah faktor pariwisata. Pariwisata juga akan membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Sebab pariwisata bisa dikatakan sebagai penggerak dari sektor-sektor lain seperti sektor industri dan jasa.

Pada penelitian Haniz & Sasana (2013) menunjukkan bahwa wajib pajak, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti besar kecilnya inflasi tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Penelitian milik Juliansyah & Sulkadria (2018) menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD, sedangkan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD. Secara simultan total penduduk dan PDRB sama-sama mempengaruhi PAD selama periode penelitian yaitu sebesar 16,07%. Penelitian Asmuruf et al. (2015) menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Kota Sorong dalam hal ini pembangunan perekonomian masih sangat minim. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal ini berarti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka PAD akan meningkat. Penelitian milik Rofiah (2016) menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame di Malang Raya. Secara parsial PDRB dan jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Sedangkan secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame di Malang Raya.

Penelitian Harmaji & Sandra (2020) menunjukkan bahwa jumlah perusahaan, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta. Pada penelitian ini jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat membuat penyelenggara reklame berfikir untuk menggunakan sejumlah media reklame untuk memasarkan

produk/jasanya. Ketika penyelenggara reklame meningkat maka penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, dan berlaku pula sebaliknya. Lestari et al. (2016) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan tetapi memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak restoran di kota Manado, dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pajak restoran di kota Manado.

Pada penelitian Lumy et al. (2018) menunjukkan bahwa secara simultan jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial jumlah penduduk, PDRB, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sarjono et al. (2018) menunjukkan bila pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sebab semakin terjadinya perkembangan perekonomian akan menyebabkan peningkatan pemungutan pajak. Selain itu hasil penelitian memperlihatkan tingkat kemiskinan dapat menguatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pajak. Artinya, semakin tinggi rendah kemiskinan maka akan semakin menguatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian dari Mongdong et al. (2018) menunjukkan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Namun, variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. Juri et al. (2019) menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, PDRB, jumlah kendaraan, dan jumlah penduduk bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial inflasi dan jumlah kendaraan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan secara parsial PDRB dan jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian Praningrum et al. (2019) menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, IPM, jumlah penduduk, jumlah industri bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Secara parsial PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sedangkan secara parsial IPM dan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Triastuti & Pratomo (2016) menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Sedangkan secara parsial pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

Pada penelitian Dzingirai Canicio (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak. artinya kuat atau lemahnya pertumbuhan ekonomi tidak mendorong atau menghambat penerimaan pajak daerah sebab pemerintah tidak efisien memanfaatkan pendapatan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak ada redistribusi pendapatan sebagai prinsip pemerataan sistem pajak.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam pengambilan sampel metode yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode dokumentasi dimana data diperoleh dari website BPS yaitu www.bps.go.id.

Pengukuran variabel dependen pada penelitian ini yaitu penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan pengukuran variabel independen pada penelitian ini yaitu belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kunjungan wisatawan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linear berganda, uji F, Uji T, dan Uji Koefisien Determinasi (R²).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
0,200	Terdistribusi normal

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa data dalam penelitian terdistribusi normal, karena nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Belanja Modal	0,956	1,038	Tidak terjadi multikolinieritas
Pertumbuhan Ekonomi	0,978	1,022	Tidak terjadi multikolinieritas
Jumlah Penduduk	0,888	1,126	Tidak terjadi multikolinieritas
Kunjungan Wisatawan	0,901	1,110	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel belanja modal (BM), pertumbuhan ekonomi (PE), jumlah penduduk (JP), dan Kunjungan Wisatawan (KW) memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada semua variabel amatan dalam penelitian ini.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangn
Belanja Modal	0,809	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pertumbuhan Ekonomi	0,829	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Jumlah Penduduk	0,083	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kunjungan Wisatawan	0,135	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel belanja modal sebesar 0,809, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,829, jumlah penduduk sebesar 0,083, dan kunjungan

wisatawan sebesar 0,135 memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Autokorealsi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin Watson</i>	Keterangan
0,892	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian menunjukkan nilai DW sebesar 0,892 ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel (n) = 108 dan jumlah variabel (k)=5, maka diperoleh nilai dU = 1,76372, dL= 1,61041. Nilai DW 0,892 lebih kecil dari batas atas (dU) yakni 1,76372 dan kurang dari (5-dU) 5 - 1,76372 =3,2363 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Signifikansi	Keterangan
Kontanta	-621996,26	0,000	
Belanja Modal	0,034	0,000	H ₁ diterima
Pertumbuhan Ekonomi	699,069	0,009	H ₂ diterima
Jumlah Penduduk	0,327	0,000	H ₃ diterima
Kunjungan Wisatawan	0,020	0,235	H ₄ ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka model analisis regresi linier berganda dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PPD = -621996,26 + 0,034BM + 699,069PE + 0,327JP + 0,020KW + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut menunjukkan pengaruh setiap variabel independen. Arti dari koefisien regresi adalah sebagai berikut:

a. $\alpha = -621996,26$

Nilai $\alpha = -621996,26$. Apabila variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kunjungan wisatawan margin memiliki nilai tetap atau konstan, maka penerimaan pajak daerah memiliki nilai sebesar -621996,26.

b. $\beta_1 = 0,034$

Nilai koefisien belanja modal menunjukkan 0,034, berarti apabila variabel belanja modal mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan.

c. $\beta_2 = 699,069$

Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi menunjukkan 699,069, berarti apabila variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan.

d. $\beta_3 = 0,327$

Nilai koefisien jumlah penduduk menunjukkan 0,327, berarti apabila variabel jumlah penduduk mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan.

e. $B_4 = 0,020$

Nilai koefisien kunjungan wisatawan menunjukkan 0,020, berarti apabila variabel jumlah penduduk mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak daerah akan mengalami peningkatan.

6. Hasil Uji Kelayakan Model (F-Test)

Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai F tabel dengan F hitung pada tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai F hitung \geq nilai F tabel dan probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 maka variabel independen dikatakan berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen dan model regresi dapat dikatakan layak. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui untuk nilai F sebesar 59,044 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi fit.

7. Hasil Uji Statistik (t-test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, untuk hasil uji t pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja modal menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, maka belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
- Pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai signifikansi 0,009 ($0,009 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
- Jumlah penduduk menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, maka jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
- Kunjungan Wisatawan menunjukkan nilai signifikansi 0,235 ($0,235 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak, maka kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Nilai Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,855	0,731	0,718	283334,853

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,855, artinya 85,5% variabel penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kunjungan wisatawan. Sedangkan sisanya sebesar 14,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah, dapat disimpulkan bahwa: (1) Belanja modal menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, maka belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah; (2) Pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai signifikansi 0,009 ($0,009 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah; (3) Jumlah penduduk menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, maka jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah; dan (4) Kunjungan Wisatawan menunjukkan nilai signifikansi 0,235 ($0,235 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, maka kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

REFERENSI

- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. v. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmu Efisien*, 15(5), 727-737.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Barat 2018*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2020). *Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020*.
- Dzingirai Canicio, T. Z. (2014). Causal relationship between government tax revenue growth and economic growth: a case of Zimbabwe (1980-2012). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 13-15.
- Haniz, N. F., & Sasana, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1-13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Harmaji, G., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Jumlah Perusahaan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004 - 2015. *Perpajakan*, 9(1), 73-85.
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(2), 58-63.
- Juri, M. H., Rudzali, A., & Verawati. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda*, 15(1), 68-81.
- Lestari, S., Masinambow, V. A. J., & Maramis, M. T. B. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 306-314.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 19, Issue 2).
- Masitoh, I. S. (2019). *Perkembangan Industri Tahu Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Kulur Kecamatan Majalengka (1999-2017)*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Mongdong, C. M., Masinambow, V. A. J., & Tumangkeng, S. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 198–209.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (Edisi 5). McGraw-Hill Book Co.
- Praningrum, A., Astuti, A. W., & Khoirudin, R. (2019). Determinan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali. *Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 58–64. <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3580>
- Rofiah, A. F. (2016). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2006-2015 (Studi Pada Malang Raya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Sarjono, N., Anwar, C., & Darmansyah, D. (2018). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah dengan Tingkat Kemiskinan sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 113–127.
- Triastuti, D., & Pratomo, D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(1), 320–330.